



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,
BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN,
DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Rapat ke	:
Sifat Rapat	: Terbuka
Dengan	: Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Hari/Tanggal	: Senin, 9 Februari 2015
Waktu	: Pukul 19.30 WIB – selesai
Acara	: Pendalaman Rincian Program dan Kegiatan RAPBN-P Tahun 2015 para Eselon I Kementerian Kesehatan RI
Ketua Rapat	: Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat	: Muhammad Yus Iqbal, SE/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Panti Surya B Hotel Aryaduta Jakarta Jl. Prapatan No. 44-48 Jakarta
Hadir	: A. orang dari 48 Anggota Komisi IX DPR RI; B. Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI beserta jajarannya;

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dibuka Ketua Rapat pada pukul 20.20 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 251 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI telah mendapatkan penjelasan dari Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI bahwa:
 - a. Alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RI (Ditjen BUK) pada APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp13.411.827.535.000,-** (*Tiga belas trilyun empat ratus sebelas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*). Selanjutnya Ditjen BUK mendapatkan alokasi anggaran tambahan pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp3.095.924.581.000,-** (*Tiga trilyun sembilan puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) sehingga total anggaran tahun 2015 menjadi **Rp16.507.752.116.000,-** (*Enam belas trilyun lima ratus tujuh milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus enam belas ribu rupiah*).
 - b. Ditjen BUK mengajukan tambahan alokasi anggaran di dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp6.356.365.000.000,-** (*Enam trilyun tiga ratus lima puluh enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah*) dengan rincian tambahan anggaran supply side pelayanan kesehatan rujukan sebesar **Rp5.374.550.000.000,-** (*lima trilyun tiga ratus tujuh puluh empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) dan peningkatan fasilitas Puskesmas dan jaringannya sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar sebesar **Rp981.815.000.000,-** (*Sembilan ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah*).
2. Komisi IX DPR RI meminta Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI untuk menyampaikan data-data sebagai berikut:
 - a. Rincian 350 Puskesmas yang menjadi target sertifikasi akreditasi;
 - b. Rincian 149 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas pembangunan pelayanan kesehatan dasar;
 - c. Rincian 110 rumah sakit rujukan regional.
 - d. Rincian 20 rumah sakit rujukan provinsi.
 - e. Rincian 14 rumah sakit rujukan nasional.Paling lambat diserahkan pada tanggal 10 Februari 2015.
3. Komisi IX DPR RI belum bersepakat dengan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang jumlah alokasi anggaran masing-masing seperti yang diuraikan dalam diktum no 2.
4. Komisi IX DPR RI meminta Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang diprioritaskan untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan memperhatikan aspirasi daerah sebagai bentuk pelaksanaan representasi anggota Komisi IX DPR RI.
5. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI untuk mengambil keputusan terkait pembahasan alokasi

anggaran untuk Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015.

Rapat diskors pukul 00.25 WIB.

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI,



Prof. Dr. dr. AKMAL TAHER, SpU (K)

Ketua Rapat/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,



PIUS LUSTRILANANG, SIP, M.Si
A-380